



Bank Syariah

AMANAH SEJAHTERA

Memberi Pelayanan Terbaik dan Islami



LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA YANG BAIK (GCG) PT BPR SYARIAH AMANAHSEJAHTERA



TAHUN 2023



www.amanahsejahtera.com



[bprs.amanahsejahtera](https://www.instagram.com/bprs.amanahsejahtera)



DAFTAR ISI

	halaman
I. PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	1
II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. CAKUPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK	3
1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	3
2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	6
3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH	8
B. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	10
1. FAKTOR DAN ASPEK PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK	10
2. MATRIKS PERINGKAT DAN TAHAPAN PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)	11
3. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	11
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI	13
D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN	13
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI	13
2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI	13
E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN DAN PERUSAHAAN LAIN	14
F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN	14
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	14
2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	14
G. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN /ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN	15
H. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS SEBAGAI ANGGOTA DPS PADA LKS LAIN	15
I. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS	15
J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	16
K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	17
1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN	17
2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	17
L. FREKUENSI RAPAT DPS	18
1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN	18
2. KEHADIRAN ANGGOTA DPS	19
M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)	20
N. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH	20
O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	20
P. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	21
III. PENUTUP	23



BAB I

PENJELASAN UMUM

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

I. PENDAHULUAN

PT BPR Syariah AmanahSejahtera yang beralamat di Jl. Kalimantan No.107 Perumahan Gresik Kota Baru Kabupaten Gresik Jawa Timur, dengan nomor telepon (031)3930204, berusaha menjadikan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pondasi utama dalam menjalankan usaha dengan harapan perusahaan dapat memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha.

Penerapan Tata Kelola yang Baik berdasarkan standard yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara konsisten, serta dibarengi perbaikan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi BPR Syariah AmanahSejahtera, yaitu :

1. Perseroan akan memiliki pondasi tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat.
2. Meningkatnya nilai perusahaan (*corporate value*) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BPR Syariah AmanahSejahtera ke depan.
3. Membentuk citra yang baik bagi BPR Syariah AmanahSejahtera sebagai Bank Syariah. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor dan mitra bisnis untuk mengikat kerjasama dengan BPR Syariah AmanahSejahtera.
4. Melaksanakan bisnis secara islami yang mendorong :
 - a. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat dan keberkahan dalam berbisnis.
 - b. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan prinsip syariah.
 - c. Kesyntingan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW.
 - d. Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
 - e. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.



- f. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.
5. Sebagai arahan strategis bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya :

VISI BPR Syariah AMANAHSEJAHTERA :

Menciptakan Bank Syari'ah yang mantap sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi umat menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berpendidikan dibawah naungan ridha Allah SWT.

MISI BPR Syariah AMANAHSEJAHTERA :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan prinsip syari'ah.
- Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah dan masyarakat dengan prinsip bagi hasil dan jual beli untuk usaha yang halal, produktif dan menguntungkan
- Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat muslim dalam menjalankan syari'ah Islam khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan



BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. CAKUPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK

1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	MUSTAFA RIDHO	DIREKTUR UTAMA	<p>TANGGUNG JAWAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi prinsip kehati-hatian dan syariah dalam mengelola perseroan serta melaksanakan POJK dan Peraturan perundangan 2) Melaksanakan amanat Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan keputusan rapat Dekom 3) Memberikan pertanggungjawaban operasional dan keuangan Perseroan dalam RUPS 4) Mewakili Perseroan di dalam dan luar pengadilan 5) Berkewajiban membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja sama dan masing-masing anggota berperan sebagai anggota tim dalam fungsinya masing-masing 6) Bertanggung jawab mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi BPR Syariah. <p>TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengkoordinir pengimplementasian visi, misi, strategi usaha serta rencana jangka panjang dan pendek secara menyeluruh 2) Mengkoordinir penyusunan RBB 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan RBB secara efektif dan efisien 4) Memimpin Perusahaan dalam menghasilkan Laba 5) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dekom, serta mengadakan rapat koordinasi dengan Dekom untuk mengevaluasi perkembangan Perseroan 6) Membuat laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja tiap semester kepada Dekom 7) Mengkoordinir penerapan Tata Kelola dalam



			<p>setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar, POJK, Peraturan perundangan serta segala ketentuan yang mengatur BPR Syariah 9) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Bagian Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya 10) Mengadakan rapat Direksi secara rutin dengan mengundang Staff yang ditunjuk untuk membahas perkembangan perseroan 11) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar 12) Mempertanggungjawabkan operasional dan laporan keuangan perseroan dalam RUPS 13) Menyetujui, menandatangani dan mengevaluasi Kebijakan dan SOP Kegiatan dalam Perusahaan 14) Mengupdate informasi tentang perbankan syariah dan kondisi makro mikro ekonomi yang mempengaruhi rencana strategis perseroan 15) Bertanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kekayaan Perseroan 16) Memelihara keharmonisan lingkungan kerja 17) Memastikan pemenuhan SDM yang memadai 18) Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian 19) Memahami secara umum sistem informasi manajemen 20) Menyetujui Pengajuan Penyaluran Dana
2	RISMARINI	DIREKTUR OPERASIONAL DAN YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	<p>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam Fungsi Kepersonaliaan, Kerumahtangaan, Pendidikan, Keuangan, Teknologi Informasi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan 2) Menjalankan Tugas sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada



			<p>seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none">b) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariahc) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangand) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariahe) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undanganf) Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPR Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariahg) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPR Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariahh) Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhani) Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR Syariahj) Melaporkan kepada Dewan Komisaris
--	--	--	---



			<p>secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR Syariah</p> <p>k) Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah</p>
--	--	--	---

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DPS			
<p>Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, telah ditindaklanjuti oleh Direksi. Satu hal yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu Menuliskan definisi Murabahah dalam akad Murabahah</p>			

2) **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KOMISARIS	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	AMAT OEMAR ASNAR	KOMISARIS UTAMA	<p>TUGAS KOMISARIS UTAMA :</p> <p>1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Agar pengawasan ini berjalan efektif, maka Dekom :</p> <p>a) Memberi nasihat kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank</p> <p>b) Melakukan kajian tentang strategi usaha yang diterapkan Bank</p> <p>c) Melakukan penilaian dan memberi nasihat atas sistem pengelolaan SDM, sistem pengendalian risiko dan Rencana Jangka Panjang dan Pendek Bank serta penjabarannya ke dalam RBB Tahunan Bank</p> <p>d) Memberi persetujuan atas rancangan strategi bisnis, kebijakan operasional Bank, prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari benturan kepentingan</p> <p>e) Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk hal yang perlu ditindaklanjuti</p> <p>f) Mengawasi secara periodik dan memberikan nasihat kepada Direksi atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan</p>



			<ul style="list-style-type: none"> g) Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RBB dan memberikan persetujuan atas revisi RBB h) Menyampaikan laporan pengawasan kepada OJK dan Pemegang Saham i) Mengawasi mutu pelayanan bank kepada nasabah j) Melakukan penilaian dan memberikan nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud k) Menyusun program kerja Dekom. <p>2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dekom dengan Direksi, Auditor Eksternal dan OJK</p> <p>3) Menjaga kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS</p> <p>4) Meneliti, menelaah dan menandatangani laporan tahunan yang disiapkan Direksi</p> <p>5) Memberikan pendapat dan saran, kemudian mengesahkan RBB tahunan yang diusulkan Direksi</p> <p>6) Memonitor perkembangan kegiatan Bank</p> <p>7) Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank</p> <p>8) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh</p> <p>9) Memberitahukan kepada OJK tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pelanggaran peraturan perundangan di bidang keuangan dan perbankan b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank
2	MOCH. ALI MUCHID	ANGGOTA KOMISARIS	Membantu Komisaris utama dalam melaksanakan tugas dewan komisaris

REKOMENDASI KEPADA DIREKSI

- Nasehat Dekom untuk Direksi pada Rapat Dewan Komisaris 08 Februari 2023 :
 - 1) Meminta Direksi serta jajaran staf terkait untuk terus meningkatkan pengawasan APU PPT karena tidak tertutup kemungkinan pada tahun 2023 gejala adanya transaksi yang



- mencurigakan akan terus meningkat, khususnya menjelang tahun pemilu 2024
- 2) RBB tahun 2023 tetap tumbuh namun tidak terlalu jauh dari RBB tahun 2022 (dengan tetap memperhatikan pencapaian/realisasi tahun 2022) mengingat kondisi makro ekonomi yang diperkirakan belum sepenuhnya membaik ditambah lagi ancaman resesi atau perlambatan ekonomi nasional
- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 2 Mei 2023 :
 - 1) Dewan Komisaris meminta direksi untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari pembiayaan Non lancar.
 - 2) Dewan Komisaris mengingatkan direksi untuk meningkatkan disiplin anggaran dengan tidak mengagendakan kegiatan yang berpotensi meningkatkan biaya diluar RBB
 - Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Juni 2023 :
 - 1) Komisaris memberikan nasehat serta arahan kepada direksi untuk lebih hati hati dalam keterlibatan bank dalam pembiayaan sindikasi. Komisaris mengingatkan untuk tetap konsisten pada prinsip syariah sesuai arahan DPS serta tetap berpegang pada SOP serta kebijakan internal bank
 - Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Juli 2023 :
 - 1) Dewan Komisaris memberikan nasehat kepada direksi untuk selalu taat azas dan memperhatikan prinsip kehati hatian dalam menjalankan operasional perbankan
 - Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober 2023 :
 - 1) Komisaris meminta kepada Direksi beserta jajarannya untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan prinsip kehati hatian.
 - 2) Komisaris juga meminta kepada Direksi beserta jajarannya untuk senantiasa menjaga komunikasi yang baik dengan pengawas OJK serta harus selalu mengikuti arahan atau bimbingan OJK khususnya dari Pengawas
 - Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 November 2023 :
 - 1) Harap di maksimalkan pemeriksaan internal erhadap analisa pembiayaan restrukturisasi
 - 2) Pengawasan secara berjenjang harus ditingkatkan guna mencegah adanya penyimpangan atau fraud atau dapat segera mengetahui sedini mungkin apabila terjadi Fraud
 - 3) Pemantauan dan tindak lanjut atas hasil audit IA, harap dibahas dalam rapat manajemen

3) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DPS	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	SUHERMAN ROSYIDI	KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	Tugas dan tanggung jawab : 1) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan Bank 2) Mengawasi kegiatan Syariah Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku



			<p>3) Menasehati dan Memberi saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah</p> <p>4) Menjadi mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional</p> <p>5) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank</p> <p>6) Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Bank</p> <p>7) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya</p> <p>8) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank</p> <p>9) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya</p> <p>10) Menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku</p>
2	AMIN WAHYUDI	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya

REKOMENDASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH KEPADA DIREKSI

- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS 20 Maret 2023
 1. Kantor Cabang diminta membuat kertas kerja untuk pemeriksaan restrukturisasi yang sudah terformat seperti pemeriksaan sebelumnya.
 2. Surat keluar manajemen, dimulai dengan Bismillah, Assalmu'alaikum (huruf arab) termasuk Wa'alaikumsalam terkahir ditutup dengan doa
- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS 17 Juli 2023
Manajemen hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap pegawai yang melakukan trading saham
- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS 16 Agustus 2023
 1. Mengubah nama akun Dana Sejahtera dalam Neraca menjadi Dana TBDSP (Tidak Bisa Diakui Sebagai Pendapatan)
 2. Menuliskan definisi Murabahah dalam akad Murabahah



- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS 11 Oktober 2023
Selama Fatwa DSN MUI No. 23 tidak dihapus, tetap menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 23

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER1		LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER2	
NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
002/BPRS-AS/DPS/VII/2023	26 JULI 2023	001/BPRS-AS/DPS/I/2024	31 JANUARI 2024

B. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

1) FAKTOR DAN ASPEK PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang Baik BPR Syariah AmanahSejahtera mengacu kepada ketentuan Tata Kelola yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut :

- Faktor 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Faktor 2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Faktor 3 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- Faktor 4 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- Faktor 5 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPR Syariah;
- Faktor 6 Penanganan benturan kepentingan;
- Faktor 7.a Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- Faktor 7.b Penerapan fungsi audit intern;
- Faktor 7.c Penerapan fungsi audit ekstern;
- Faktor 8 Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- Faktor 9 Batas maksimum penyaluran dana;
- Faktor 10 Rencana bisnis BPR Syariah
- Faktor 11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Proses penerapan/penilaian Tata Kelola, menggunakan 3 (tiga) aspek governance yaitu :

- a. Governance structure yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja Bank serta menilai kecukupan infrastruktur berupa antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.
- b. Governance process yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.
- c. Governance outcome yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome sehingga memenuhi harapan stakeholders Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

2) MATRIKS PERINGKAT DAN TAHAPAN PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

a. MATRIKS PERINGKAT FAKTOR TATA KELOLA YANG BAIK

- 1) Peringkat 1
Mencerminkan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik.
- 2) Peringkat 2
Mencerminkan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik.
- 3) Peringkat 3
Mencerminkan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik.
- 4) Peringkat 4
Mencerminkan penerapan Tata Kelola yang secara umum Kurang Baik.
- 5) Peringkat 5
Mencerminkan penerapan Tata Kelola yang secara umum Tidak Baik.

b. TAHAPAN/PROSES PENILAIAN

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek governance dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance.

3) HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan metode dan tahapan self assessment di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Tata Kelola di BPR Syariah AmanahSejahtera untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

NO	FAKTOR	S	P	H	S+P+H	TOTAL PENILAIAN FAKTOR
1	FAKTOR 1: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0.64	0.40	0.10	1.14	0.23
2	FAKTOR 2: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0.72	0.50	0.10	1.32	0.20
3	FAKTOR 3: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	0.50	0.40	0.10	1.00	0.10
4	FAKTOR 4: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	FAKTOR 5: PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN BPR SYARIAH	0.50	0.40	0.15	1.05	0.08
6	FAKTOR 6: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0.50	0.40	0.10	1.00	0.08



7	FAKTOR 7.A: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0.50	0.53	0.13	1.16	0.09
8	FAKTOR 7.B: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0.50	0.50	0.13	1.13	0.08
9	FAKTOR 7.C: PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03
10	FAKTOR 8: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	0.67	0.57	0.10	1.34	0.10
11	FAKTOR 9: BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
12	FAKTOR 10: RENCANA BISNIS BPR SYARIAH	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
13	FAKTOR 11: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
NILAI						1,1
PERINGKAT						1

KETERANGAN :

S : STRUKTUR

P : PROSES

H : HASIL

KESIMPULAN		
HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR SYARIAH AMANAHSEJAHTERA		
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,1	SANGAT BAIK	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
ANALISIS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah dapat memenuhi kewajiban terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan pemenuhan komposisi Direksi, Komisaris dan DPS,serta pemenuhan satuan kerja yang terkait. 2. Independensi Pengurus Bank berkaitan dengan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, rangkap jabatan, sebagian besar sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan yang terjadi dalam Bank. 3. Sumber daya manusia terutama yang bertugas dalam Bagian Kepatuhan, Internal Audit, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPR Syariah dibekali dengan pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah. 4. Perusahaan senantiasa berusaha menciptakan Budaya Kepatuhan dan sadar resiko dalam setiap lini jabatan. 5. Penyusunan Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi dalam pelaksanaannya. 6. Transparansi Laporan Keuangan ditunjukkan dengan mengirimkan Laporan Bulanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 		

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI :

Berikut ini adalah tabel mengenai kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR Syariah AmanahSejahtera.

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI			
		BPR SYA YANG BERSANGKUTAN		PERUSAHAAN LAIN	
		NOMINAL SAHAM (Rp.)	PRESENTASE KEPEMILIKAN (%)	NAMA PERUSAHAAN	PRESENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan antara Direksi dengan anggota Direksi lainnya, pemegang saham pengendali dan anggota Dewan Komisaris.

1. HUBUNGAN KEUANGAN

DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
	PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH AS	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR SYA AS	ANGGOTA DIREKSI LAIN BPR SYARIAH AS
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN

DIREKSI	HUBUNGAN KEKELUARGAAN		
	PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH AS	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR SYA AS	ANGGOTA DIREKSI LAIN BPR SYARIAH AS
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Catatan :

- Komisaris Utama yaitu Bapak Amat Oemar Asnar merupakan suami dari Saudara kandung Orang Tua dari Direktur Utama yaitu Bapak Mustafa Ridho.
- Pada Laporan Tata Kelola perusahaan tahun 2022 yang disampaikan Januari 2023, belum disampaikan keterkaitan ini, dikarenakan pada saat itu peraturan yang mengatur tentang pihak terkait yaitu PBI No.13 tahun 2011, menyatakan hubungan ini bukan termasuk pihak terkait. Sedangkan peraturan baru yang menggantikannya yaitu POJK No.23 tahun 2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPR Syariah, yang berlaku sejak Februari 2023, mengatur bahwa hubungan tersebut termasuk dalam pihak terkait.

E. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS PADA BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN DAN PERUSAHAAN LAIN

Berikut ini adalah tabel mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Syariah AmanahSejahtera.

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS			
		BPR SYA YANG BERSANGKUTAN		PERUSAHAAN LAIN	
		NOMINAL	PRESENTASE KEPEMILIKAN	NAMA PERUSAHAAN	PRESENTASE KEPEMILIKAN
1	AMAT OEMAR ASNAR	Rp. 630.400.000	10.46%	1. PT PIRANTI SARANA SEHAT SEJAHTERA 2. PT SARANA SEHAT UTAMA 3. PT SARANA SEHAT LAMONGAN 4. PT. SARANA SEHAT OPTIK	2.65% 42% 1% 1.25%
2	MOCH ALI MUCHID	Rp. 87.500.000	1.45%	NIHIL	NIHIL

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan antara Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham dan anggota Direksi.

1) HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
		PEMEGANG SAHAM BPR SYA AS	DEWAN KOMISARIS LAIN DI BPR SYA AS	DIREKSI BPR SYARIAH AS
1	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEKELUARGAAN DENGAN		
		PEMEGANG SAHAM BPR SYA AS	DEWAN KOMISARIS LAIN DI BPR SYA AS	DIREKSI BPR SYARIAH AS
1	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	MUSTAFA RIDHO
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Catatan :

- Komisaris Utama yaitu Bapak Amat Oemar Asnar merupakan suami dari Saudara kandung Orang Tua dari Direktur Utama yaitu Bapak Mustafa Ridho.
- Pada Laporan Tata Kelola perusahaan tahun 2022 yang dilaporkan pada Januari 2023, belum disampaikan keterkaitan ini, dikarenakan pada saat itu peraturan yang mengatur tentang pihak terkait

Yaitu PBI No.13 tahun 2011, menyatakan hubungan ini bukan termasuk pihak terkait. Sedangkan peraturan baru yang menggantikannya yaitu POJK No.23 tahun 2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPR Syariah, yang berlaku sejak Februari 2023, mengatur bahwa hubungan tersebut termasuk dalam pihak terkait.

G. RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Independency dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut :

NO	DEWAN KOMISARIS	NAMA PERUSAHAAN/ LEMBAGA LAIN	JABATAN
1	AMAT OEMAR ASNAR	PT SARANA SEHAT UTAMA	KOMISARIS UTAMA
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	-

H. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS SEBAGAI ANGGOTA DPS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Professional pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut :

NO	NAMA DPS	NAMA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN	JABATAN
1	SUHERMAN ROSYIDI	BPR SYARIAH UNAWI BAROKAH SIDOARJO	ANGGOTA DPS
2	AMIN WAHYUDI	BPR SYARIAH AI MABRUR PONOROGO	ANGGOTA DPS

I. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KETENTUAN RUPS

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima selama periode Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		DPS	
	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)
REMUNERASI						
Gaji Pokok	2	560.362.512,-	2	262.800.000,-	2	108.000.000,-
Tunjangan	2	108.835.736,-	2	22.500.000,-	2	6.333.333,-
Tantiem	-	0	-	0	-	0
Bonus	2	12.937.500,-	2	12.937.500,-	2	2.434.629,-
Kompensasi Berbasis	-	0	-	0	-	0

Saham						
Remunerasi Lainnya	-	0	-	0	-	0
FASILITAS LAIN DALAM BENTUK NATURA						
Perumahan	-	-	-	-	-	
Transportasi	2	Mobil Dinas	2	Fasilitas antar jemput ke kantor atau diganti uang transport	2	Fasilitas antar jemput ke kantor atau diganti uang transport
Tunjangan Purna Jabatan	2	193,054,250,-	2	175.000.000,-	1	25.000.000,-
Asuransi Kesehatan	2	11.520.000,-	-	0	-	0

Catatan :

- Yang dimaksud tunjangan di sini adalah Tunjangan PPh 21, Tunjangan Pulsa dan Tunjangan Hari Raya.
- Tunjangan Purna Jabatan hanya diterima 1 DPS karena anggota DPS yaitu Bapak Amin Wahyudi belum menyelesaikan 1 periode jabatan.

J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap maupun tidak tetap sampai dengan pelaksana. Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada periode Tahun 2023 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut :

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

NO	URAIAN	RASIO 2023
1	Rasio Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi terendah	1.11
2	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.22
3	Rasio Gaji anggota DPS tertinggi terhadap Gaji anggota DPS terendah	1.36
4	Rasio Gaji Pegawai tertinggi terhadap Gaji Pegawai terendah	3.82
5	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	0.51
6	Rasio Gaji pegawai tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	0.37

Catatan :

- Yang dimaksud dengan gaji pegawai, Direksi, Dekom dan DPS adalah hak gaji yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai atau pengurus dan DPS yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan
- Yang dimaksud Pegawai adalah pegawai tetap dan kontrak sampai dengan level pelaksana



K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam upaya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode Tahun 2023 melaksanakan rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	AGENDA RAPAT
1	8 FEBRUARI 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi terhadap realisasi kinerja tahun 2022 Hasil audit/ Draft Manajemen Letter dari KAP Persiapan RUPS Lain Lain
2	2 Mei 2023	2	Surat dari OJK No. S-51/KR.0413/2023 tentang hasil pembahasan RBB dan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis semester II tahun 2022
3	13 JUNI 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> Laporan performance perseroan sampai dengan akhir Mei 2023 Dewan Komisaris mendelegasikan kewenangan untuk melakukan hapus buku pembiayaan dengan jumlah baki pokok maksimal sebesar Rp. 100.000.000,-
4	26 JULI 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> Laporan performance perseroan Semester 1 tahun 2023 Laporan tindak Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Laporan Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 tahun 2023 Proyeksi akhir tahun 2023
5	24 OKTOBER 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi terhadap realisasi kinerja semester III tahun 2023 Penawaran/Penjualan saham dari bapak H. Dr Ali Faishal, H. Sulthon Amien dan ahli waris alm Bapak H. Sugeng
6	16 NOVEMBER 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi rencana dan evaluasi kinerja sampai dengan akhir oktober 2023. Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dan rekomendasi OJK
7	4 DESEMBER 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> Prognose Laporan Keuangan akhir tahun 2023 Progress penambahan saham tahun 2023 Mobile Banking Amanah

2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	FREKUENSI KEHADIRAN		PERSENTASE TINGKAT KEHADIRAN
		FISIK	TELEKONFERENSI	
1	AMAT OEMAR ASNAR	7	0	100%
2	MOCH ALI MUCHID	7	0	100%



L. FREKUENSI RAPAT DPS

Pada tahun 2023, Frekuensi kehadiran DPS dalam rangka pengawasan pelaksanaan Prinsip syariah di perusahaan adalah sebagai berikut :

1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN :

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	AGENDA RAPAT
1	18 JANUARI 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil Pemeriksaan 3 nasabah terbesar per produk pembiayaan dan pendanaan per posisi akhir Desember 2022, untuk Laporan Semester II 2022 Dewan Pengawas Syari'ah. ▪ Laporan DPS Semester II 2022. ▪ Penyampaian hasil audit OJK th 2022 terkait dengan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah • Pembahasan lain-lain : terkait biaya penitipan agunan pembiayaan (yang sudah lunas tetapi belum diambil)
2	16 FEBRUARI 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pemeriksaan per kantor cabang untuk sampling per produk baik pembiayaan dan pendanaan (tabungan dan deposito) dengan format terlampir. • Hasil Pemeriksaan masing-masing cabang akan diserahkan ke Bagian IT (lewat google drive)
3	20 MARET 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan Restrukturisasi Pembiayaan (tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK th 2022 untuk Dewan Pengawas Syariah) ▪ Perhatian OJK tentang biaya admin tabungan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN ▪ Hasil Pemeriksaan Bulan Februari dari 4 kantor cabang dijelaskan oleh pak Amin, terlampir hasil pemeriksaan bulan Februari 2023 dan sudah disetujui pak Herman. ▪ Pemeriksaan perhitungan Bagi Hasil (Pusat) dan cadangan bagi hasil yang belum dibagikan (per cabang). • Nasehat untuk Direksi.
4	5 APRIL 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Restrukturisasi Pembiayaan (tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK th 2022 untuk Dewan Pengawas Syariah) • Hasil Pemeriksaan Bulan Maret dari 4 kantor cabang dijelaskan oleh pak Amin, terlampir hasil pemeriksaan bulan Maret 2023 dan sudah disetujui pak Herman. • Tugas Pemeriksaan bulan Maret 2023, untuk DPK dan pembiayaan dari pembukaan dan pencairan pembiayaan bulan Maret 2023 (termasuk jika ada Musyarakah) • Pemeriksaan perhitungan Bagi Hasil (Pusat) dan cadangan bagi hasil yang belum dibagikan (per cabang).
5	17 MEI 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil Pemeriksaan bapak Amin dengan uji petik 5 nasabah per produk pembiayaan dan pendanaan yang realisasi di bulan April 2023 per cabang.



			<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Deposito yang dibagikan per April 2023
6	17 JULI 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemeriksaan syariah Bapak Amin di Kantor Cabang Surabaya • Tanggapan Pak Herman mengenai Laporan Kinerja Direktur Kepatuhan Juni 2023 • Berkaitan dengan kejadian Fraud Karyawan, DPS meminta meningkatkan pengawasan dari atasan
7	16 AGUSTUS 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> • Akad turunan produk murabahah • Evaluasi Laporan Kinerja Direktur Kepatuhan bulan Juli 2023 • Pembahasan tentang fraud cabang Lamongan
8	11 OKTOBER 2023	2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian Hasil Pemeriksaan Audit Cab. Lamongan oleh bapak Amin Wahyudi meliputi: Biaya Bagi Hasil pada kantor cabang lain --->istilah bagi hasil yang tidak tepat 2) Penyampaian hasil Pra Ijtima dari pak Herman <ul style="list-style-type: none"> • Lain-lain
9	13 DESEMBER 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Audit DPS oleh OJK tahun 2023 • Hasil Pra Ijma' bapak Herman • Pengawasan Kantor Cerme dan Pengawasan semua kantor • Lain-lain

KEGIATAN LAIN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI LUAR RAPAT

NO	TANGGAL KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	AGENDA KEGIATAN
1	14 JUNI 2023	1	Bincang Santai tentang ekonomi Syariah bersama Nasabah
2	22 JUNI 2023	1	Pemeriksaan penerapan Prinsip Syariah pada Produk Tabungan, Deposito dan Pembiayaan di Kantor Cabang Surabaya
3	20 SEPTEMBER 2023	1	Bincang Santai tentang ekonomi Syariah bersama Nasabah
4	26 SEPTEMBER 2023	1	Pemeriksaan penerapan Prinsip Syariah pada Produk Tabungan, Deposito dan Pembiayaan di Kantor Cabang Lamongan
5	8 NOVEMBER 2023	1	Bincang Santai tentang ekonomi Syariah bersama Nasabah
6	22 NOVEMBER 2023	1	Pemeriksaan penerapan Prinsip Syariah pada Produk Tabungan, Deposito dan Pembiayaan di Kantor Cabang Cerme

2. KEHADIRAN RAPAT ANGGOTA DPS

NO	NAMA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT		PERSENTASE TINGKAT KEHADIRAN
		FISIK	TELEKONFERENSI	
1	SUHERMAN ROSYIDI	9	0	100%
2	AMIN WAHYUDI	9	0	100%

M. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2023, terjadi internal fraud di BPR Syariah AmanahSejahtera, sebagaimana tabel berikut :

NO	INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH :		
		DEKOM/ DIREKSI	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP
1	Penggelapan Angsuran Pembiayaan dan Setoran Tabungan Nasabah	0	0	1

Catatan :

Sepanjang tahun 2023 terdapat 1 kejadian fraud yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Bagian Internal Audit. Menindaklanjuti kejadian fraud tersebut, Bank telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian yaitu :

- Pemberian sanksi kepada pegawai dengan memberhentikan.
- Penagihan kepada pelaku atas kerugian yang ditimbulkan, dan meminta jaminan atas nominal yang masih belum dapat dikembalikan.
- Peningkatan kedisiplinan dalam menjalankan prosedur untuk bagian terkait.
- Reminder, sharing session dalam Rapat-rapat Manajemen.
- Penguatan supervisi kepada bawahan.

N. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH

Selama periode Tahun 2023, terdapat perkara hukum baik berupa gugatan ataupun yang lainnya. Sebagaimana tabel berikut :

No	PERKARA HUKUM	Jumlah (Satuan)	
		Perdata	Pidana
1	TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP	0	0
2	DALAM PROSES PENYELESAIAN	1	0
	TOTAL	1	0

Catatan :

Dalam hal ini, Bank sebagai tergugat II, dimana tergugat I adalah Nasabah Pembiayaan dan pihak yang menggugat adalah Pemilik Jaminan. Usaha penyelesaian yang telah ditempuh Bank adalah melakukan mediasi dengan pihak penggugat dan Nasabah, menyiapkan bukti yang menguatkan posisi Bank sehingga diharapkan tidak terjadi kerugian material maupun immaterial bagi Bank.

O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2023, Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

NO	PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN		PENGAMBILAN KEPUTUSAN		JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	PENJELASAN
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN			
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



P. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2023 BPR Syariah AmanahSejahtera telah menyalurkan dana sosial sebesar Rp.28.631.500,- dan tidak menyalurkan dana untuk jenis kegiatan Poitik apapun. Rinciannya sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENYALURAN	JENIS KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	PIHAK PENERIMA DANA	JUMLAH (Rp)
1	20230104	01	DONASI PEMBANGUNAN MASJID AN NUR	MASJID AN NUR BALONG PANGGANG	200.000,-
2	20230117	01	SUMBANGAN PRIMKOVERI (PENSIUNAN TNI) TAHUN 2023	PRIMKOVERI LAMONGAN	50.000,-
3	20230131	01	WAKAF GRAHA BPRS	KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO	750.000,-
4	20230228	01	WAKAF GRAHA BPRS	KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO	750.000,-
5	20230329	01	MEMBERIKAN 15 PAKET ZAKAT FITRAH UNTUK ANAK YATIM DHUAFU	YAYASAN YATIM MANDIRI	600.000,-
6	20230331	01	WAKAF GRAHA BPRS	KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO	750.000,-
7	20230414	01	KEGIATAN RAMADHAN KANTOR CABANG SURABAYA 2023 BERUPA PEMBAGIAN TAKJIL	MASYARAKAT DAN MASJID DI SEKITAR KANTOR CABANG SURABAYA	250.000,-
8	20230418	01	KEGIATAN RAMADHAN KANTOR OPERASIONAL PUSAT 2023 BERUPA PEMBAGIAN TAKJIL DAN BUKA PUASA SERTA KEGIATAN PONDOK ROMADHON SISWA	MASYARAKAT DAN MASJIDDI SEKITAR KANTOR OPERASIONAL PUSAT DAN KANTOR KAS GRESIK, SERTA SDNU KANJENG SEPUH DEKAT KANTOR KAS BUNGAH	4.929.500,-
9	20230427	01	KEGIATAN RAMADHAN KANTOR CABANG CERME BERUPA PEMBAGIAN TAKJIL UNTUK MASYARAKAT DI MASJID	MASJID DI SEKITAR KANTOR CABANG CERME	720.000,-
10	20230427	01	KEGIATAN RAMADHAN KANTOR CABANG LAMONGAN 2023 BERUPA PEMBAGIAN TAKJIL DAN BUKA PUASA UNTUK MASYARAKAT DAN MASJID	MASYARAKAT DAN MASJID DI SEKITAR KANTOR CABANG LAMONGAN	3.125.000,-
11	20230428	01	WAKAF GRAHA BPRS	KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO	750.000,-
12	20230428	01	KEGIATAN RAMADHAN KANTOR CABANG CERME 2023 BERUPA SANTUNAN	ANAK YATIM DARI YAYASAN YATIM MANDIRI SEBANYAK	7.500.000,-



			ANAK YATIM	30 ORANG	
13	20230530	01	WAKAF GRAHA BPRS	KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO	750.000,-
14	20230620	01	SUMBANGAN PURNAWIRAWAN TNI AD	KODIM LAMONGAN	150.000,-
15	20230627	01	WAKAF GRAHA BPRS	KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO	750.000,-
16	20230712	01	SUMBANGAN KEGIATAN AGUSTUS WARGA	PERANGKAT DESA KELURAHAN KEPATIHAN MENGANTI	200.000,-
17	20230725	01	SUMBANGAN KEGIATAN WARGA	RW DUKUH KAPASAN	100.000,-
18	20230808	01	SUMBANGAN HUT RI	PENGELOLA RUKO GADING MENGANTI	150.000,-
19	20230816	01	SUMBANGAN HUT RI	KELURAHAN SIDOKUMPUL	200.000,-
20	20230818	01	SUMBANGAN HUT RI	KECAMATAN CERME	100.000,-
21	20230824	01	SUMBANGAN PENGAJIAN NU	NU TERONGBANGI	250.000,-
22	20230904	01	PENYALURAN DANA ZAKAT	LAZ NURUL HAYAT	4.457.000,-
23	20231016	01	DONASI UNTUK PALESTINA	KOMPARTEMEN ASBISINDO JAWA TIMUR PLUS	1.000.000,-
24	20231122	01	HUT PURNAWIRAWAN TNI AL RAYON LAMONGAN	PURNAWIRAWAN TNI AL RAYON LAMONGAN	150.000,-
TOTAL					28.631.500,-

Catatan :

Jenis Kegiatan 01 : disalurkan dalam kegiatan social

Jenis Kegiatan 02 : disalurkan dalam kegiatan politik



BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Tata Kelola Yang Baik Perusahaan (Good Corporate Governance) PT BPR Syariah AmanahSejahtera tahun 2023.

Dibuat di,
Gresik 15 Januari 2024

MUSTAFA RIDHO
DIREKTUR UTAMA

AMAT OEMAR ASNAR
KOMISARIS UTAMA